



Implementasi Website Sistem Administrasi Dinas Pendidikan (SIADIK) Di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Nurul Husna Tumanggor¹, Nofi Nurman²

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email Korespondensi: nurultumangger22@gmail.com, nfnoerman@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Education Office Administration System Website (SIADIK) at the Jambi Provincial Education Office as a form of E-Government implementation in improving the effectiveness of public service administration. SIADIK is a digital-based administrative platform developed by the Educational Information and Communication Technology Center (BTIKP) since the end of 2022, with the goal of accelerating correspondence processes, facilitating letter disposition, enhancing administrative transparency, and supporting digital archiving. This study employs a descriptive qualitative method, collecting data through observation, in-depth interviews with 15 informants, and documentation. Data analysis was conducted using George C. Edward III's policy implementation model, encompassing four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that SIADIK implementation has been carried out gradually and has yielded positive impacts, including a significant acceleration in letter processing with an overall time efficiency of 72.3%, improved transparency in disposition workflows, and enhanced bureaucratic work efficiency. However, implementation still faces challenges such as limited ongoing socialization, technological infrastructure gaps in peripheral schools, and the absence of specific Standard Operating Procedures (SOPs) to formally regulate system usage. Therefore, increased socialization and training, strengthened information technology infrastructure, and the formulation of dedicated SOPs are needed to support the sustainability and optimization of SIADIK implementation.

Keywords: SIADIK, E-Government, Policy Implementation, Public Service Administration

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Website Sistem Administrasi Dinas Pendidikan (SIADIK) di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai bentuk penerapan E-Government dalam meningkatkan efektivitas administrasi pelayanan publik. SIADIK merupakan platform administrasi berbasis digital yang dikembangkan oleh Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) sejak akhir tahun 2022, dengan tujuan mempercepat proses surat-menyurat, mempermudah disposisi surat, meningkatkan transparansi alur administrasi, serta mendukung pengelolaan arsip secara digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 15 informan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIADIK telah dilaksanakan secara bertahap dan memberikan dampak positif berupa percepatan pemrosesan surat secara signifikan, yakni efisiensi waktu mencapai 72,3% secara keseluruhan, peningkatan transparansi alur disposisi, serta efisiensi kerja birokrasi. Namun demikian, implementasi SIADIK masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sosialisasi berkelanjutan, kesenjangan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah wilayah pinggiran, serta belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur penggunaannya secara formal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta penyusunan SOP khusus guna mendukung keberlanjutan dan optimalisasi implementasi SIADIK.

Kata Kunci: SIADIK, E-Government, Implementasi Kebijakan, Administrasi Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era transformasi digital dan Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan negara (Djanapa Bulow et al., 2024). Dalam konteks tersebut, digitalisasi birokrasi menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem administrasi konvensional yang dinilai lambat dan rentan terhadap kesalahan administratif (Natika, 2024).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan istilah Electronic Government (E-Government). World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, kelompok bisnis, dan aparatur pemerintah (Al & Et, 2021). Sementara itu, Indrajit menyatakan bahwa E-Government merupakan mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat yang melibatkan penggunaan teknologi informasi, terutama internet, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan publik. Penerapan E-Government tidak hanya menitikberatkan pada penggunaan teknologi, tetapi juga menuntut adanya perubahan pola kerja birokrasi, budaya organisasi, serta sistem administrasi publik yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Muallidin, 2014).

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendorong transformasi digital pemerintahan secara nasional ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indonesia, 2004). Regulasi tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indonesia, 2018).

Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Emilio, 2022). Berdasarkan regulasi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melalui Balai Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Pendidikan (BTIKP) meluncurkan inovasi digital berupa Website Sistem Administrasi Dinas Pendidikan (SIADIK) pada akhir tahun 2022. SIADIK dikembangkan sebagai platform administrasi berbasis digital yang bertujuan mempercepat proses surat-menyurat, mempermudah disposisi surat, meningkatkan transparansi alur administrasi, serta mendukung pengelolaan arsip secara digital (Nathasya, 2024).

Kehadiran SIADIK diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja aparatur, mengurangi penggunaan kertas, serta meminimalkan keterlambatan dalam proses administrasi. Salah satu keunggulan utama SIADIK adalah fitur notifikasi surat dan disposisi secara real time melalui aplikasi WhatsApp, yang memungkinkan pengguna untuk segera mengetahui dan menindaklanjuti surat masuk tanpa harus mengakses sistem secara manual. Namun demikian, sebagai sistem yang relatif baru dan masih dalam tahap pengembangan, implementasi SIADIK belum sepenuhnya berjalan optimal. Ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi, gangguan sistem pada kondisi tertentu, serta hambatan teknis yang mempengaruhi proses unggah dan pengelolaan dokumen (Nathasya, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana implementasi Website SIADIK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dijalankan; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Website SIADIK. Adapun urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian komprehensif terhadap sistem administrasi digital yang masih berada pada fase transisi dan pengembangan, melibatkan tiga kategori pengguna secara simultan: pegawai internal dinas, satuan pendidikan, dan masyarakat umum.

Penelitian terdahulu mengenai E-Government di Indonesia telah dilakukan dari berbagai perspektif. Sari (2018) meneliti implementasi Aplikasi Smart Netizen di Kabupaten Lampung Tengah dengan temuan bahwa adaptasi pengguna dan ketersediaan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan. Subagyo (2024) mengkaji E-SURADI di Dinas Pendidikan Kota Malang dan menemukan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik (Ilmiah et al., 2024). Wahyudi dan Mursalin (2020) meneliti implementasi E-Government di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi melalui Aplikasi Halo Jaksa. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini mengkaji sistem yang masih dalam fase transisi aktif dengan cakupan pengguna yang lebih luas dan konteks geografis Provinsi Jambi yang beragam, sehingga memberikan perspektif baru dalam kajian implementasi E-Government di Indonesia (Djanapa Bulow et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Uma sekaran, 2015). Menurut Cresswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang

terlibat dalam fenomena tersebut. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji proses implementasi kebijakan secara holistik dan kontekstual, yang tidak dapat diukur hanya melalui angka-angka statistik semata (Sugiyono, 2017). Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober hingga awal November 2025 di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6, Telanaipura, Kota Jambi, dan beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ditetapkan sebagai pilot project penerapan SIADIK. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi partisipasi terbatas, di mana peneliti mengamati interaksi pengguna dengan sistem SIADIK, alur kerja administrasi yang didukung sistem, serta kendala teknis dan non-teknis yang muncul dalam penggunaan sehari-hari. Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 15 informan yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan penggunaan SIADIK. Ketiga, dokumentasi berupa laporan aktivitas Website SIADIK, panduan penggunaan, kebijakan terkait SPBE, dan data statistik penggunaan sistem (Ardiansyah et al., 2023).

Tabel 1. Komposisi Informan Penelitian

No	Jabatan	Kategori	Jumlah
1	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Informan Pendukung	1
2	Kepala BTIKP	Informan Kunci	1
3	Kepala Seksi PTP dan PTIP BTIKP (Developer SIADIK)	Informan Kunci	1
4	Operator SIADIK	Informan Kunci	1
5	Staf/Pegawai Dinas Pendidikan	Informan Pendukung	5
6	Kepala Sekolah SMA/SMK	Informan Pendukung	4
7	Masyarakat Umum Pengguna SIADIK	Informan Pendukung	2

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan interaktif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Beibby Z.N. Muliaan et al., 2024). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki peran dan sudut pandang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SIADIK, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama: (1) Komunikasi, yang mencakup transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi penyampaian kebijakan kepada seluruh pihak terkait; (2) Sumber Daya, meliputi sumber daya manusia, finansial, dan

infrastruktur teknologi; (3) Disposisi, yakni sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan; serta (4) Struktur Birokrasi, yang mencakup pembagian tugas, prosedur kerja, dan mekanisme koordinasi antar unit kerja (Pramono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Website SIADIK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

a. Latar Belakang dan Tujuan Pengembangan SIADIK

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi meluncurkan Website Sistem Administrasi Dinas Pendidikan (SIADIK) sejak akhir tahun 2022 sebagai wujud nyata dari penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara yuridis, implementasi SIADIK memiliki landasan yang kuat berupa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2022. Kepala BTIKP menegaskan bahwa sistem ini dikembangkan sebagai bentuk respons terhadap kebijakan SPBE yang mewajibkan pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital guna menyederhanakan proses birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Laili Choirunnisa Ahmad Ainur & Ridlo, 2023).

Selain didorong oleh kebijakan formal, penerapan SIADIK juga dilatarbelakangi oleh permasalahan praktis dalam pelaksanaan sistem administrasi manual, antara lain: proses disposisi surat yang memakan waktu hingga beberapa hari, penumpukan arsip fisik yang membutuhkan ruang penyimpanan besar, serta kesulitan dalam penelusuran dokumen yang telah diarsipkan. Kepala Seksi PTP dan PTIP BTIKP menyampaikan bahwa inovasi SIADIK muncul sebagai respons atas keluhan masyarakat dan instansi pendidikan terkait lambannya proses pengelolaan surat masuk, termasuk kasus surat yang tidak dapat terlacak keberadaannya.

Implementasi SIADIK dilakukan secara bertahap (gradual). Pada tahap awal, sistem digunakan secara internal di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 2025, pemanfaatan SIADIK diperluas kepada satuan pendidikan tingkat SMA dan SMK sebagai pengguna layanan administrasi, serta masyarakat umum yang membutuhkan layanan persuratan dan pengaduan. Namun hingga saat ini, penggunaan oleh satuan pendidikan masih terbatas pada sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai pilot project.

b. Mekanisme Kerja SIADIK

Website SIADIK dapat diakses melalui alamat siadik.disdik.jambiprov.go.id. Pada halaman utama (beranda) tersedia menu navigasi yang terdiri dari Beranda, Latar Belakang, Tujuan & Manfaat, IT Support, Masuk/Login, Kirim Surat & Pengaduan, serta Rekapitulasi. Mekanisme kerja SIADIK mencakup serangkaian tahapan yang terintegrasi sebagaimana diuraikan berikut.

Tahap pertama adalah akses dan registrasi pengguna. Pengguna wajib melakukan pendaftaran dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk masyarakat umum atau Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk pegawai dan satuan pendidikan, disertai nomor WhatsApp aktif dan pembuatan kata sandi.

Setelah registrasi berhasil, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi konfirmasi melalui WhatsApp.

Tahap kedua adalah proses pengajuan dan pengiriman surat secara daring. Pengguna mengisi formulir pengiriman surat yang mencakup perihal, tanggal, nomor surat, tujuan bidang, serta mengunggah file surat dalam format digital (PDF, JPG, atau PNG). Dengan mekanisme ini, surat tidak perlu lagi disampaikan secara fisik ke kantor dinas, sehingga memberikan kemudahan terutama bagi sekolah yang berada di luar Kota Jambi.

Tahap ketiga adalah verifikasi dan disposisi digital. Surat yang dikirim masuk ke sistem internal dinas untuk diverifikasi oleh operator. Setelah dinyatakan lengkap, pimpinan melakukan disposisi secara digital melalui sistem. Proses disposisi digital memungkinkan pendistribusian surat berlangsung lebih cepat dibandingkan sistem manual, karena dapat dilakukan dalam hitungan menit bahkan ketika pimpinan sedang berada di luar kantor selama tersedia koneksi internet. Tahap keempat adalah pemantauan status dan pengarsipan digital. SIADIK dilengkapi fitur pelacakan status surat secara real-time, mulai dari tahap pengajuan, verifikasi, disposisi, hingga penyelesaian. Seluruh surat yang telah diproses tersimpan secara permanen dalam database sistem dengan keamanan terjaga, sehingga memudahkan penelusuran dokumen di kemudian hari.

c. Efisiensi Waktu Proses Administrasi

Penelitian ini melakukan analisis perbandingan waktu proses administrasi antara sistem manual dengan sistem SIADIK berdasarkan observasi langsung dan wawancara dengan operator serta pegawai yang pernah menangani administrasi manual sebelum tahun 2022. Hasil perbandingan menunjukkan peningkatan efisiensi yang sangat signifikan pada setiap tahapan proses administrasi surat masuk.

Tabel 2. Perbandingan Waktu Proses Administrasi Sistem Manual vs SIADIK

Tahapan Proses	Manual (menit)	SIADIK (menit)	Efisiensi (%)
Penerimaan Surat	10	2	80,0%
Pencatatan/Registrasi Surat	15	5	66,7%
Verifikasi Kelengkapan Dokumen	20	8	60,0%
Penomoran Agenda Surat	10	3	70,0%
Disposisi oleh Pimpinan	45	10	77,8%
Penyampaian ke Unit Terkait	30	5	83,3%
Pemrosesan/Tindak Lanjut	60	30	50,0%
Pencarian/Pelacakan Arsip	60	5	91,7%
Penyusunan Surat Balasan	40	15	62,5%
Pengarsipan Dokumen	20	3	85,0%

Total	310	86	72,3%
--------------	------------	-----------	--------------

Sumber: Observasi dan wawancara di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2025

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa total waktu proses administrasi surat masuk berkurang dari 310 menit (5 jam 10 menit) dalam sistem manual menjadi hanya 86 menit (1 jam 26 menit) dalam sistem SIADIK, menghasilkan efisiensi waktu sebesar 72,3%. Efisiensi tertinggi terjadi pada tahap pencarian arsip (91,7%) dan penyampaian ke unit terkait (83,3%), sedangkan efisiensi terendah terdapat pada tahap pemrosesan/tindak lanjut (50,0%) yang masih memerlukan intervensi manusia secara substantif. Capaian ini mengkonfirmasi bahwa SIADIK secara signifikan mampu menghemat lebih dari dua pertiga waktu yang dibutuhkan dibandingkan sistem administrasi manual.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Website SIADIK

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SIADIK mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi memegang peranan krusial dalam implementasi kebijakan publik karena melalui komunikasi yang efektif, suatu kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait. Dalam konteks implementasi SIADIK, komunikasi kebijakan dilakukan melalui berbagai saluran, baik formal maupun informal, meliputi surat edaran resmi, media digital (website resmi dan video tutorial melalui kanal YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi), serta grup WhatsApp (Pramono, 2020).

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMA mengungkapkan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada media daring, seperti kanal YouTube dan website resmi Dinas Pendidikan, serta penyampaian informasi melalui grup WhatsApp. Hingga saat ini, belum terdapat sosialisasi secara langsung atau tatap muka yang secara khusus membahas penggunaan SIADIK kepada pengguna terkait. Kondisi ini diperkuat oleh temuan di lapangan yang menunjukkan masih terdapat kepala sekolah maupun masyarakat yang menyampaikan surat secara manual karena belum mendapatkan sosialisasi penggunaan SIADIK secara langsung.

Dalam kerangka teori Edward III, komunikasi mencakup tiga aspek: transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi komunikasi. Transmisi informasi terkait SIADIK telah dilakukan melalui berbagai saluran. Namun, kejelasan pesan dan konsistensi komunikasi masih belum optimal. Sosialisasi cenderung hanya dilaksanakan pada tahap awal peluncuran tanpa diikuti program edukasi lanjutan yang berkelanjutan, sehingga terjadi kesenjangan pemahaman di tingkat pengguna. Di sisi lain, aspek positif komunikasi terlihat dari responsivitas tim BTIKP yang menyediakan saluran pengaduan melalui WhatsApp dan menindaklanjutinya secara cepat, meskipun hal ini belum mampu menggantikan kebutuhan akan komunikasi kebijakan yang lebih terstruktur dan komprehensif (Maryvonne Lumley & James Wilkinson, 2014).

b. Sumber Daya (Resources)

Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks SIADIK, sumber daya mencakup tiga dimensi utama: sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur teknologi (Eka Nurtiara et al., 2025).

Dari segi sumber daya manusia, BTIKP memiliki jumlah personel yang relatif terbatas, terdiri dari beberapa orang yang berperan sebagai pengembang sistem, administrator, dan operator. Kepala PTP dan PTIP BTIKP menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia pengelola pada dasarnya telah memenuhi kompetensi teknis di bidang teknologi informasi, namun dari segi kuantitas masih belum mencukupi untuk mendukung implementasi SIADIK secara optimal di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan pendampingan dan pelatihan ke sekolah-sekolah yang tersebar di berbagai wilayah.

Dari aspek finansial, Kepala BTIKP menyatakan bahwa anggaran untuk pengembangan SIADIK, pemeliharaan server, dan pembaruan sistem pada dasarnya telah terpenuhi, sehingga implementasi SIADIK tidak mengalami hambatan finansial yang signifikan. Namun, dari segi infrastruktur teknologi, masih ditemukan kesenjangan yang cukup mencolok. Infrastruktur di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tergolong memadai, sementara di tingkat sekolah, khususnya yang berada di wilayah pinggiran dan terpencil, masih terdapat keterbatasan perangkat komputer dan ketidakstabilan jaringan internet. Kepala SMA Negeri 1 Muaro Jambi menyampaikan bahwa kendala utama penggunaan sistem berbasis digital adalah jaringan internet yang belum stabil, terutama bagi sekolah di luar pusat kota. Kondisi ini secara langsung menghambat pemanfaatan SIADIK secara optimal dan real-time.

c. Disposisi (Disposition)

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang dibebankan kepada mereka. Hasil penelitian menunjukkan variasi disposisi yang cukup signifikan di antara pengguna SIADIK. Terdapat kelompok yang menunjukkan sikap positif dan mendukung implementasi sistem, umumnya terdiri dari pegawai dengan pemahaman teknologi informasi yang baik dan menyadari manfaat nyata digitalisasi bagi efisiensi kerja. Salah satu staf Bidang Pembinaan SMA menyampaikan bahwa SIADIK memberikan kemudahan yang signifikan dalam proses surat-menyurat, di mana surat cukup dipindai dan diunggah ke sistem, kemudian diteruskan kepada pimpinan untuk disposisi, sehingga penggunaan kertas dapat dikurangi dan risiko kehilangan arsip dapat diminimalkan.

Di sisi lain, masih ditemukan resistensi dari kelompok pengguna tertentu yang cenderung mempertahankan cara kerja manual karena dianggap lebih familiar dan pasti. Dari aspek komitmen organisasi, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat melalui pengembangan sistem secara berkelanjutan dan penugasan sumber daya manusia di BTIKP. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat toleransi terhadap penggunaan mekanisme administrasi manual, khususnya bagi sekolah yang mengalami kendala teknis. Meskipun kebijakan toleransi ini dapat dipahami dalam konteks keterbatasan infrastruktur,

kondisi ini secara tidak langsung mengurangi dorongan bagi sebagian satuan pendidikan untuk segera beradaptasi dengan sistem digital.

d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta mekanisme koordinasi antar unit kerja. Salah satu kelemahan struktural yang ditemukan dalam implementasi SIADIK adalah belum tersedianya SOP khusus yang mengatur penggunaan dan alur kerja sistem secara formal. Hingga saat ini, pelaksanaan layanan administrasi melalui SIADIK masih mengacu pada SOP pengelolaan surat masuk dan keluar yang berlaku secara umum di dinas. Kepala BTIKP mengakui bahwa SOP khusus SIADIK saat ini masih dalam tahap penyusunan dan diharapkan dapat menjadi acuan resmi bagi instansi pendidikan dan masyarakat.

Dari aspek koordinasi, BTIKP harus berkoordinasi dengan sekretariat, bidang-bidang pembinaan, dan pimpinan dinas dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam praktiknya, koordinasi ini tidak selalu berjalan optimal ketika terdapat kebutuhan pengembangan fitur baru yang harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Hal ini tercermin dari adanya fitur pengurutan surat yang belum berjalan otomatis, di mana pengguna masih harus melakukannya secara manual. Fragmentasi organisasi juga terlihat dalam pembagian level akses sistem, mulai dari administrator dengan kewenangan penuh, operator yang bertugas verifikasi, hingga pengguna biasa. Pembagian ini diperlukan untuk keamanan sistem, namun dapat memperlambat proses kerja apabila personel yang memiliki kewenangan tertentu tidak tersedia.

e. Sintesis Analisis Implementasi SIADIK

Berdasarkan analisis menggunakan model Edward III, implementasi SIADIK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah menunjukkan potensi yang besar sebagai inovasi pelayanan administrasi berbasis digital, dengan capaian efisiensi waktu yang sangat signifikan. Aspek pendukung utama implementasi meliputi: (1) komitmen organisasi dalam mengembangkan sistem secara berkelanjutan; (2) kualitas sumber daya manusia pengelola yang kompeten di bidang teknologi informasi; (3) dukungan anggaran yang relatif memadai; (4) sikap positif dari kelompok pendukung sebagai agen perubahan; (5) responsivitas tim BTIKP dalam menindaklanjuti keluhan pengguna; dan (6) ketersediaan media komunikasi digital.

Sementara itu, faktor penghambat yang perlu segera diatasi mencakup: (1) keterbatasan jumlah sumber daya manusia pengelola; (2) kesenjangan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah wilayah pinggiran dan terpencil; (3) belum tersedianya SOP khusus SIADIK; (4) sosialisasi yang belum berkelanjutan dan belum menjangkau seluruh kelompok sasaran; serta (5) toleransi terhadap sistem manual yang mengurangi urgensi adaptasi digital. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sari (2018) yang menekankan pentingnya adaptasi pengguna dan infrastruktur, serta Subagyo (2024) yang menyoroti dampak positif digitalisasi persuratan terhadap kualitas layanan publik.

SIMPULAN

Implementasi Website Sistem Administrasi Dinas Pendidikan (SIADIK) di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah dilaksanakan secara bertahap sejak akhir tahun 2022 sebagai bentuk penerapan E-Government dalam administrasi persuratan dan pengarsipan. Secara umum, SIADIK terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja birokrasi secara signifikan, dengan efisiensi waktu keseluruhan mencapai 72,3% dibandingkan sistem manual. Percepatan paling mencolok terjadi pada tahap pencarian arsip (91,7%) dan disposisi surat (77,8%), yang merupakan dua tahapan yang paling sering menjadi bottleneck dalam sistem administrasi konvensional. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III mengidentifikasi bahwa faktor pendukung utama implementasi SIADIK adalah komitmen pimpinan organisasi, kualitas sumber daya manusia pengelola yang kompeten, dan ketersediaan sistem digital yang inovatif dengan fitur notifikasi real-time via WhatsApp. Adapun faktor penghambat utama adalah keterbatasan sosialisasi berkelanjutan yang menyebabkan pemahaman pengguna belum merata, kesenjangan infrastruktur teknologi khususnya di sekolah-sekolah wilayah pinggiran, serta belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus SIADIK yang mengatur mekanisme penggunaannya secara formal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi perlu meningkatkan dukungan terhadap pemerataan infrastruktur teknologi dan pelaksanaan sosialisasi berkelanjutan yang menjangkau seluruh satuan pendidikan; (2) BTKIP perlu memprioritaskan penyelesaian SOP SIADIK, meningkatkan intensitas pendampingan teknis kepada pengguna, serta menyempurnakan fitur sistem seperti pengurutan surat otomatis (3) Pengguna SIADIK diharapkan meningkatkan pemanfaatan sistem secara aktif dan konsisten, serta berpartisipasi dalam menyampaikan masukan untuk pengembangan sistem; dan (4) Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas dan tingkat kepuasan pengguna SIADIK atau membandingkannya dengan sistem administrasi digital serupa di daerah lain. Penulis menyampaikan apresiasi kepada Jurnal Al-Zayn beserta dewan editor dan mitra bestari atas kesempatan, arahan, serta evaluasi akademik yang konstruktif dalam penelaahan naskah ini. Dukungan tersebut sangat berperan dalam meningkatkan kualitas artikel hingga layak dipublikasikan. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi melalui data, referensi, maupun diskusi akademik yang memperkaya pembahasan. Semoga naskah ini bermanfaat.

DAFTAR RUJUKAN

- Al, K., & Et. (2021). *E.Goverment* (Vol. 32, Issue 3).
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan> Volume 1 Nomor 2 Juli 2023. Ardiansyah, Risnita, M. Syahrani, Jailani. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.

- Beibby Z.N. Muliaan, Merinda H. Ch. Pandowo, & Christoffel M.O. Mintardjo. (2024). Evaluasi Penerapan Reward terhadap Peningkatan Kerja Karyawan di Rumah Makan Tepi Pantai. *Jurnal EMBA*, 12(1), 145–150.
- Djanapa Bulow, I., Ilmudinulloh, R., Diklat, B., Manado, K., Mr, J. A. A., Maramis, K. M., Bawah, P., Mapanget, K., Manado, K., Institut, B., Islam, A., Manado, N., Sarundajang, S. H., & Ringroad, K. (2024). Adaptasi Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Manado di Era Society 5.0. *Prosiding PITNAS Widyaiswara*, 1, 438–448. <https://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/pitnas2024/article/view/302>
- Eka Nurtiara, Afrizal Afrizal, & Ella Afnira. (2025). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bintan Tahun 2024. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(3), 338–355. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.1026>
- Emilio. (2022). Nomor 12 Tahun 2022. In *מאמר* (Issue 8.5.2017).
- Ilmiah, J., Pendidikan, W., Layanan, P., Publik, I., Aplikasi, M., Gemilang, T., & Kabupaten, D. (2024). <https://doi.org/10.5281/Zenodo.10533303>. 10(4), 817–824.
- Indonesia. (2018). Perpres No. 95 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- Indonesia, R. (2004). *Nomor 3 tahun 2003* (Vol. 2004).
- Laili Choirunnisa Ahmad Ainur, T. H. C. O., & Ridlo, E. I. R. (2023). PERAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA UIN Sunan Ampel Surabaya Pendahuluan Dalam era digital yang semakin berkembang pesat , pemerintah di seluruh dunia mencari cara untuk menin. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71–95. [https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/401%0Afile:///C:/Users/USER/Downloads/PERAN+SISTEM+PEMERINTAH+BERBASIS+ELEKTRONIK+\(SPBE\)+DALAM+MENINGKATKAN+AKSESIBILITAS+PELAYANAN+PUBLIK+DI+INDONESIA+\(1\).pdf](https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/401%0Afile:///C:/Users/USER/Downloads/PERAN+SISTEM+PEMERINTAH+BERBASIS+ELEKTRONIK+(SPBE)+DALAM+MENINGKATKAN+AKSESIBILITAS+PELAYANAN+PUBLIK+DI+INDONESIA+(1).pdf)
- Maryvonne Lumley & James Wilkinson. (2014). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Developing Employability for Business*, 1(September), 1–13.
- Muallidin, I. (2014). Konsep, Kerangka Pikir, Kerangka Nilai E-Government Dan E-Service. *Tugas Matakuliah Manajemen Pelayanan Publik*, 1–18. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2167/WORKING%0APAPER%0A-%0AKONSEP%2C%0AKERANGKA%0APIKIR%2C%0AKERANGKA%0ANILAI%0AE-GOVERNMENT%0A%26%0AE-SERVICE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Nathasya, H. (2024). No TitleELENH. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80.
- Natika, L. (2024). Volume 6 Issue 1, Juni 2024 <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>. 6(1), 1–11.

- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Sugiyono. (2017). Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian. In *Metode Penelitian*. Kencana.
- Uma sekaran, R. B. (2015). Metode Penelitian Metode Penelitian. In *Metode Penelitian Kualitatif* (Issue 17). [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)